



PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

**PERUBAHAN RENJA
DINAS PARIWISATA KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025**

**DINAS PARIWISATA KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 dapat selesai disusun sesuai dengan yang diharapkan.

Mendasari ketentuan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholders* terhadap Kota Pangkal Pinang.

Perubahan Renja (P-Renja) Tahun 2025 disusun dengan mempedomani Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025.

Atas tersusunnya Perubahan Renja (P-Renja) ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kepeduliannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, aamiin.


**PIK KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA PANGKAL PINANG,**

**Drs. WASPADA
PEMBINA TK. 1
NIP. 196705051998021001**



**PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
DINAS PARIWISATA**

Jalan Rasakunda Kecamatan Girimaya; Pos-el : dispar@pangkalpinangkota.go.id
Laman : www.wonderful.pangkalpinangkota.go.id ; Pangkal Pinang 33143

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 700/038/KEP/DISPAR/V/2025**

**TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)
DINAS PARIWISATA KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA PANGKAL PINANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan perlu disusun Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA);
- b. bahwa Perubahan RENJA sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Perubahan dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang tentang Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2007-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 Nomor 1);

19. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang;
20. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 144);
21. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 277).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang Tentang Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang Tahun 2025, dengan ketentuan umum, yaitu:

1. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja - Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

6. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
7. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
8. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
10. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
11. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
12. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
13. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
14. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kedua : Sistematisa penyusunan Perubahan RENJA (P-Renja), yaitu:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematisa penulisan

BAB II Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun berjalan

Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun berjalan dan capaian Renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

- BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Menjelaskan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah
- BAB IV Penutup
Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

Ketiga : Penjelasan lebih lanjut terlampir dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 28 Mei 2025



Atas nama Kepala Dinas Pariwisata
Kota Pangkal Pinang,

Drs. W. SPADA
PEMBINA Tk. 1
NIP. 196705051998021001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Perubahan Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja Perubahan OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perubahan OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

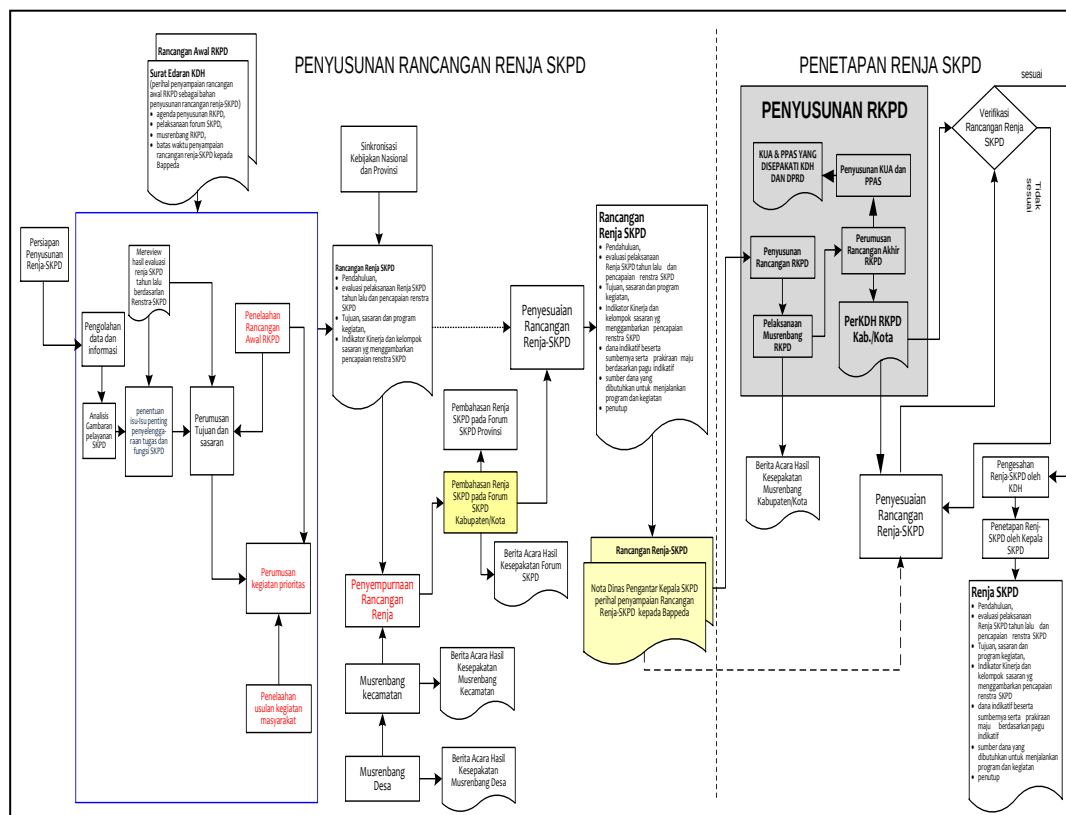
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi tahun pertama RPD paruh ke dua dari RPJP-D Kota Pangkal

Pinang Tahun 2007-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2027 Serta Renstra Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

3. Program dan kegiatan dalam Perubahan Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Perubahan Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Perubahan Rencana kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar di bawah.

Gambar Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perubahan



1.2.Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (*Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18*), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 Nomor 1).
12. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2021 Nomor 51);
13. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 144);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 57);

15. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 277).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang, sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan PD adalah untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PKUA-PPAS) Tahun 2025.

Adapun dengan terbatasnya pendanaan sehingga terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami refocusing di anggaran induk tahun 2025. Untuk itu dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 dilakukan efisiensi anggaran di pos-pos belanja yang menunjang pelaksanaan operasional dinas.

1.4. Sistematika Penulisan Perubahan Renja

Perubahan Perencanaan kinerja (P-Renja) tahun 2025 Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang disusun dengan sistematika, sebagai berikut

BAB I. PENDAHULUAN berisi :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan Perubahan Renja

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 berisi :

- 2.1. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.3. Isu-isu Rencana Penyelenggaraan Tupoksi OPD

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH berisi:

- 1.1. Tujuan dan Sasaran OPD
- 1.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 Dinas Pariwisata

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :

TRIWULAN I
Evaluasi Terhadap Hasil Renja
Perangkat Daerah Dinas Pariwisata
Kota Pangkal Pinang Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	032601	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	73.42	4.193.698.525	74,450	859.845.406	74,450	1.277.624.410	0	0	0	0	74,450	2.137.469.816	100	50,969	SEKRETARIAT
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	100		100		100		0	0		100		100		SEKRETARIAT	
2		032601202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	3.391.627.165	100	717.953.057	100	1.051.797.402	0	0	0	0	100	1.769.750.459	100	52,180	SUBKOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
3		032601202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	31	3.391.627.165	31	717.953.057	31	1.051.797.402	0	0	0	0	31	1.769.750.459	100	52,180	SUBKOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN
4		032601205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	0	20.000.000	100	0	300	0	0	0	0	0	400	0	100	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
5		032601205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	5	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
6		032601206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	188.791.400	100	50.467.498	100	33.767.821	0	0	0	0	100	84.235.319	100	44,618	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
							I		II		III		IV						
					1	2	3	4	5	6		7		8					9
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7		032601206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	4.886.000	1	0	1	2.440.000	0	0	0	0	1	2.440.000	100	49,939	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
8		032601206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	21.007.400	1	138.000	1	5.451.000	0	0	0	0	1	5.589.000	100	26,605	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
9		032601206005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	12.898.000	0	0	1	3.500.000	0	0	0	0	1	3.500.000	50	27,136	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
10		032601206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	150.000.000	1	50.329.498	1	22.376.821	0	0	0	0	1	72.706.319	100	48,471	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
11		032601208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	387.192.264	100	88.074.851	100	75.883.825	0	0	0	0	100	163.958.676	100	42,346	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
12		032601208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	128.400.000	1	14.895.611	1	14.766.815	0	0	0	0	1	29.662.426	100	23,102	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
13		032601208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	27.800.000	1	6.750.000	1	7.096.750	0	0	0	0	1	13.846.750	100	49,808	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN
14		032601208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	230.992.264	1	66.429.240	1	54.020.260	0	0	0	0	1	120.449.500	100	52,144	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAAN

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
						I		II		III		IV							
						1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
15		032601209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	206.087.696	100	3.350.000	100	116.175.362	0	0	0	0	100	119.525.362	100	57,997	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWIAAN
16		032601209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	62.681.696	1	2.800.000	1	5.724.455	0	0	0	0	1	8.524.455	100	13,600	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWIAAN
17		032601209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	1	35.830.000	1	550.000	1	3.150.000	0	0	0	0	1	3.700.000	100	10,327	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWIAAN
18		032601209009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	107.576.000	1	0	1	107.300.907	0	0	0	0	1	107.300.907	100	99,744	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWIAAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	100,000	50,969	
PREDIKAT KINERJA																	ST	R	
19	-	032602	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik wisata milik pemerintah yang dikembangkan kualitasnya (Dengan Satuan:%)	6	4.475.561.072	1,630	152.669.104	1,630	242.014.385	0	0	0	0	1,630	394.683.489	27,167	8,819	BIDANG DESTINASI PARIWISATA DAN INDUSTRI PARIWISATA
20		032602202	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten /Kota	Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis P ar i w i s a t a K a b u p a t e n / K o t a (Dengan Satuan:%)	50	531.382.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA
21		032602202002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten /Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata K a b u p a t e n / K o t a (D e n g a n Satuan:Dokumen)	1	531.382.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
22		032602203	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota (Dengan Satuan:%)	100	3.944.178.872	0	152.669.104	300	242.014.385	0	0	0	0	300	394.683.489	100	10,007	SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA
23		032602203004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Dengan Satuan:Unit)	16	3.658.881.272	2	152.669.104	2	139.635.695	0	0	0	0	2	292.304.799	12,500	7,989	SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA
24		032602203006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota (Dengan Satuan:Laporan)	2	285.297.600	0	0	2	102.378.690	0	0	0	0	2	102.378.690	100	35,885	SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																27,167	8,819		
PREDIKAT KINERJA																SR	SR		
25	-	032603	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Wisata yang dipasarkan (Dengan Satuan:%)	37	1.261.825.012	41	54.195.468	41	136.971.154	0	0	0	0	41	191.166.622	100	15,150	BIDANG PEMASARAN PARIWISATA
26		032603201	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Persentase data pariwisata yang dikelola (Dengan Satuan:%)	100	1.261.825.012	100	54.195.468	100	136.971.154	0	0	0	0	100	191.166.622	100	15,150	SUBKOORDINATOR PROMOSI PARIWISATA
				Jumlah promosi event pariwisata yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Even)	5		4		4		0		0		4		80		SUBKOORDINATOR PROMOSI PARIWISATA
				Persentase industri pariwisata yang difasilitasi dalam kegiatan promosi Pariwisata (Dengan Satuan:%)	5		4		4		0		0		4		80		SUBKOORDINATOR PROMOSI PARIWISATA

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
27		032603201001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri. (Dengan Satuan:Promosi)	1	1.007.241.712	1	54.195.468	1	55.571.693	0	0	0	0	1	109.767.161	100	10,898	SUB KOORDINATOR PROMOSI PARIWISATA	
28		032603201002	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Dengan Satuan:kegiatan)	1	254.583.300	0	0	1	81.399.461	0	0	0	0	1	81.399.461	100	31,974	SUB KOORDINATOR PROMOSI PARIWISATA	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		100,000	15,150	
PREDIKAT KINERJA																		ST	SR	
29	-	032604	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase ekonomi kreatif yang dikembangkan (Dengan Satuan:%)	28,080	178.538.000	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	21,368	0	BIDANG EKONOMI KREATIF	
30		032604202	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Komunitas Ekonomi Kreatif yang memperoleh insenti (Dengan Satuan:%)	67	178.538.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUBKOORDINATOR AKSES PERMODALAN DAN PEMASARAN	
31		032604202005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif (Dengan Satuan:Dokumen)	1	178.538.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUBKOORDINATOR AKSES PERMODALAN DAN PEMASARAN	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		21,368	0,000	
PREDIKAT KINERJA																		SR	SR	
32	-	032605	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif (Dengan Satuan:%)	22	251.173.300	50	92.434.721	15	17.181.000	0	0	0	0	15	109.615.721	68,182	43,641	BIDANG EKONOMI KREATIF	
33		032605202	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Parwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang memperoleh Sertifikasi (Dengan Satuan:%)	4	251.173.300	1,243	92.434.721	3,729	17.181.000	0	0	0	0	4,972	109.615.721	100	43,641	SUBKOORDINATOR RISET EDUKASI PENGEMBANGAN SDM DAN INFRASTRUKTUR	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
34		032605202001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Dengan Satuan:Orang)	30	137.345.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUBKOORDINATOR RISET, EDUKASI, PENGEMBANGAN SDM DAN INFRASTRUKTUR
35		032605202007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Dengan Satuan:Orang)	5	113.828.000	19	92.434.721	19	17.181.000	0	0	0	0	19	109.615.721	100	96,299	SUBKOORDINATOR RISET, EDUKASI, PENGEMBANGAN SDM DAN INFRASTRUKTUR
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	68,182	43,641	
PREDIKAT KINERJA																	S	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																	69,453	23,716	
PREDIKAT KINERJA																	S	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				- -SDM yang berkompeten -Jadwal kegiatan yang teratur (BIDANG PEMASARAN) - -SDM yang dimiliki memadai - Aturan dan kebijakan yang mendukung kepariwisataan seperti perda dll - Tersedianya anggaran -Peralatan dan perlengkapan kerja yang mendukung tersedia (BIDANG DESTINASI PARIWISATA) - Mendapat dukungan langsung dari kemenparekraf karena ditetapkannya Pangkalpinang sebagai kota kreatif Indonesia (BIDANG EKRAF)															
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				- Data yang diterima dari stakeholder sering terlambat (BIDANG PEMASARAN) - Rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam pariwisata -Terbatasnya wewenang, perencanaan dan pengelolaan pembangunan kawasan pariwisata (BIDANG DESTINASI PARIWISATA) - Minimnya anggaran untuk melakukan koordinasi ke kota/kabupaten kreatif & kemenparekraf (BIDANG EKRAF)															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:				- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan melakukan inovasi dalam setiap pekerjaan (BIDANG PEMASARAN) - -Melakukan koordinasi dengan stakeholder -Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal (BIDANG DESTINASI PARIWISATA) - Menjalin jejaring dengan kota/kabupaten kota kreatif lainnya baik jejaring nasional maupun internsional (BIDANG EKRAF)															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:				- Meningkatkan kunjungan jumlah wisatawan (BIDANG PEMASARAN) - Meningkatkan dan melakukan pengembangan destinasi pariwisata (BIDANG DESTINASI PARIWISATA) - Meningkatkan jejaring terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif (BIDANG EKRAF)															

Adapun capaian indikator tujuan Dinas Pariwisata yaitu Persentase PAD sektor pariwisata terhadap pendapatan tahun 2024 sebesar 17,58% atau Rp. 35.288.589.984,50 dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkal Pinang secara keseluruhan yaitu Rp. 200.725.271.208,80.

Sedangkan capaian indikator sasaran jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2024 sejumlah 351.906 orang dengan target 214.753 orang. Untuk capaian indikator sasaran rata-rata lama tinggal wisatawan pada tahun 2024 adalah 1,63 hari dengan target 1,06 hari. Sedangkan capaian indikator tingkat hunian akomodasi untuk tahun 2024 adalah 32,20 % dari target 25%. Untuk indikator persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki izin dengan target 73,57% realisasinya tercapai 83,23%.

Berikut pencapaian kinerja program sampai dengan triwulan I tahun anggaran 2025:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 73.42% dan capaian kinerja nilai 74,75 serta indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah dengan target 100% dan capaian kinerja 100%.
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan indikator Persentase daya tarik wisata milik pemerintah yang dikembangkan kualitasnya dengan target 6 % dan capaian kinerja 18,03%.
3. Program Pemasaran Pariwisata dengan indikator Persentase Daya Tarik Wisata yang Dipasarkan dengan target 38% dan capaian kinerja 55%.
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan indikator Persentase Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan dengan target 34,61% dan capaian kinerja 28,06%.
5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan indikator Persentase Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif dengan target 32 % dan capaian kinerja 36,84%.

Secara keseluruhan untuk rata-rata capaian kinerja sudah baik dan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata

Pada tahun 2024 Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang melaksanakan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan besaran atau total biaya yakni sebesar Rp 9.833.265.436,40 (Sembilan milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh enam koma empat puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Dilaksanakan dengan kegiatan :

1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Indikator : Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP
- Biaya : Rp 3.262.278.462,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

1.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Indikator : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
- Biaya : Rp 3.262.278.462,-

1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Indikator : Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah
- Biaya : Rp 190.316.905,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

1.2.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Indikator : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
- Biaya : Rp 4.886.000,-

1.2.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Indikator : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
- Biaya : Rp 18.864.100,-

1.2.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Indikator : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
- Biaya : Rp 17.392.500,-

1.2.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Biaya : Rp 149.817.305,-

1.3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Indikator : Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah
- Biaya : Rp 33.700.000,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

1.3.1. Pengadaan Mebel

- Indikator : Jumlah Paket Mebel yang disediakan
- Biaya : Rp 33.700.000,-

1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Indikator : Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Biaya : Rp 355.289.889,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

1.4.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
- Biaya : Rp 70.399.419,-

1.4.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
- Biaya : Rp 27.379.250,-

1.4.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
- Biaya : Rp 257.511.220,-

1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Indikator : Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik
- Biaya : Rp 176.645.426,57,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

1.5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Indikator : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
- Biaya : Rp 36.092.220,-

1.5.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
- Biaya : Rp 33.252.300,-

1.5.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Indikator : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi
- Biaya : Rp 107.300.906,57,-

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Dilaksanakan dengan kegiatan :

2.1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- Indikator : Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- Biaya : Rp 526.240.970,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

2.1.1. Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- Indikator : Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata
- Biaya : Rp 526.240.970,-

2.2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

- Indikator : Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- Biaya : Rp 3.910.885.062,83

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

2.2.1. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

- Indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- Biaya : Rp 3.645.295.292,83

2.2.2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

- Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- Biaya : Rp 265.589.770,-

3. Program Pemasaran Pariwisata

Dilaksanakan dengan kegiatan :

3.1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- Indikator : Persentase data pariwisata yang dikelola
Jumlah promosi event pariwisata yang dilaksanakan
Persentase industri pariwisata yang difasilitasi dalam kegiatan promosi Pariwisata
- Biaya : Rp 858.956.753,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

3.1.1. Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

- Indikator : Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
- Biaya : Rp 428.786.131,-

3.1.2. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

- Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
- Biaya : Rp 430.170.622,-

4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Dilaksanakan dengan kegiatan :

4.1. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

- Indikator : Persentase Komunitas Ekonomi Kreatif yang memperoleh insentif
- Biaya : Rp 178.033.200,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

4.1.1. Pengembangan Sistem Pemasaran

- Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem

Pemasaran Ekonomi Kreatif

- Biaya : Rp 178.033.200,-

5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dilaksanakan dengan kegiatan :

5.1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

- Indikator : Persentase Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
- Biaya : Rp 101.819.047,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

5.1.1. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata

- Indikator : Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata
- Biaya : Rp 101.819.047,-

5.2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

- Indikator : Persentase SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang memperoleh Sertifikasi
- Biaya : Rp 239.099.721,-

Dilaksanakan dengan sub kegiatan :

5.2.1 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

- Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
- Biaya : Rp 129.484.000,-

5.2.1 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif

- Indikator : Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif
- Biaya : Rp 109.615.721,-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Pariwisata

Disadari bahwa dalam penyelenggaraan Tupoksi Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang, masih dihadapkan pada isu dan permasalahan, antara lain :

2.3.1. Isu Strategis dan Permasalahan Urusan Pariwisata

Adapun yang menjadi isu strategis urusan pariwisata adalah :

1. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. Masih kurangnya peran serta dan kerjasama antar pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah, swasta dan lainnya) dalam pengembangan pariwisata daerah;
3. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan dan daya tarik wisata;
4. Belum optimalnya pemasaran destinasi pariwisata

Dengan permasalahan sebagai berikut :

- a. Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang belum optimal
- b. Belum adanya riset pasar wisatawan
- c. Strategi komunikasi pemasaran belum optimal
- d. Kegiatan promosi masih berjalan parsial
- e. Belum optimalnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder
- f. Kemitraan usaha pariwisata yang belum optimal
- g. Belum dilakukannya riset untuk pengembangan ekonomi kreatif
- h. Pengetahuan dan keterampilan pelaku ekonomi kreatif perlu ditingkatkan
- i. Skema insentif bagi pengembangan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual belum terbangun
- j. Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Hak Kepada Kekayaan Intelektual atas karyanya masih terbatas

Dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang, maka digunakan strategi yaitu Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan sarana pariwisata melalui pembangunan infrastruktur, SDM pariwisata, pengembangan promosi, kemitraan pariwisata.

Dalam melaksanakan strategi tersebut, diperlukan adanya arah kebijakan yang menjadi prioritas Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang, yaitu:

1. Pelaksanaan kinerja yang akuntabel dan pelayanan prima pada Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang;
2. Peningkatan sarana dan prasarana di objek wisata dalam rangka mendukung pengembangan daya tarik wisata;
3. Peningkatan promosi pariwisata secara masif melalui media cetak dan elektronik;
4. Pembinaan dan peran serta pelaku ekonomi kreatif; dan
5. Meningkatkan kualitas SDM pelaku ekonomi kreatif.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi

Disadari bahwa pembangunan pariwisata saat ini masih dihadapkan pada permasalahan antara lain :

- a. Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang belum optimal
- b. Belum adanya riset pasar wisatawan
- c. Strategi komunikasi pemasaran belum optimal
- d. Kegiatan promosi masih berjalan parsial
- e. Belum optimalnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder
- f. Kemitraan usaha pariwisata yang belum optimal
- g. Belum dilakukannya riset untuk pengembangan ekonomi kreatif
- h. Pengetahuan dan keterampilan pelaku ekonomi kreatif perlu ditingkatkan
- i. Skema insentif bagi pengembangan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual belum terbangun

- j. Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual atas karyanya masih terbatas

Adapun faktor yang menghambat pelayanan perangkat daerah antara lain :

- a. Terbatasnya dukungan dana APBD maupun APBN
- b. Kurangnya pemanfaatan teknologi digital
- c. Data kepariwisataan tidak lengkap
- d. Masih kurangnya aksesibilitas, amenitas, acillary dan atraksi pariwisata di daerah
- e. Kurangnya diversifikasi produk wisata di daerah
- f. Pemasaran belum fokus pada upaya meningkatkan dampak pada peningkatan
- g. Masih banyak SDM pariwisata yang belum memiliki sertifikasi

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang tahun 2025 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS PARIWISATA							6.519.992.870,00	6.920.142.277,00	5.672.591.887,10	-847.400.982,90							6.274.747.365,00		
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							6.519.992.870,00	6.920.142.277,00	5.672.591.887,10	-847.400.982,90							6.274.747.365,00		
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							6.519.992.870,00	6.920.142.277,00	5.672.591.887,10	-847.400.982,90							6.274.747.365,00		
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah				100 73,42 Nilai Nilai	73,42 100 Nilai Nilai	5.314.554.170,00	5.074.100.825,00	4.307.806.919,10	-269.793.589,00							5.044.760.581,00		
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP				100 %	100 %	3.789.885.470,00	4.086.846.669,00	3.632.347.559,10	-157.537.910,90			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang		3.774.783.581,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	3.789.885.470,00	4.086.846.669,00	3.632.347.559,10	-157.537.910,90	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBLAKAKAH PECAJIAN PEMERINTAH DEKATAN PERJALANAN KERJA	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			3.774.783.581,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN				0 %	0 %	44.000.000,00	0,00	0,00	-44.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang		56.400.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				55 Paket	55 Paket	44.000.000,00	0,00	0,00	-44.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			36.400.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	625.060.700,00	511.772.500,00	268.758.900,00	-356.301.800,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang		340.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.878.000,00	4.878.000,00	2.440.000,00	-2.438.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			5.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				22 Paket	9 Paket	191.660.000,00	162.260.000,00	77.950.000,00	-113.710.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	85.250.000,00	0,00	0,00	-85.250.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			0,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	52.832.200,00	52.825.000,00	30.376.000,00	-22.456.200,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	40.440.500,00	41.809.500,00	25.492.900,00	-14.947.600,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			15.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	132.500.000,00	-117.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	580.090.000,00	406.469.960,00	359.619.460,00	-220.470.540,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang		596.997.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	122.400.000,00	122.400.000,00	83.600.000,00	-38.800.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			128.400.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	30.300.000,00	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan			29.800.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	427.390.000,00	253.769.960,00	245.719.460,00	-181.670.540,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan		438.797.000,00	DIINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik penangk daerah dalam Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	275.518.000,00	69.011.696,00	47.080.000,00	-228.438.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	276.580.000,00	DIINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.250.000,00	57.261.696,00	35.330.000,00	-4.920.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan		40.750.000,00	DIINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	35.330.000,00	11.750.000,00	11.750.000,00	-23.580.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan		35.830.000,00	DIINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	199.938.000,00	0,00	0,00	-199.938.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan		200.000.000,00	DIINAS PARIWISATA	
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik wisata milik pemerintah yang dikembangkan kualitasnya				6 %	6 %	555.191.700,00	1.040.492.680,00	810.224.024,00	-28.104.916,00						527.086.784,00		
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				100 %	100 %	555.191.700,00	1.040.492.580,00	810.224.024,00	255.032.324,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	527.086.784,00	DIINAS PARIWISATA	
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				17 Unit	17 Unit	555.191.700,00	1.040.492.580,00	810.224.024,00	255.032.324,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan		527.086.784,00	DIINAS PARIWISATA	
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Wisata yang dipasarkan				38 %	38 %	479.011.000,00	654.812.872,00	488.025.944,00	20.989.000,00						500.000.000,00		
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi event pariwisata yang dilaksanakan Persentase data pariwisata yang dikelola Persentase industri pariwisata yang difasilitasi dalam kegiatan promosi Pariwisata				100 % 5 % 5 Event	100 % 5 % 5 Event	479.011.000,00	654.812.872,00	488.025.944,00	9.014.944,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	500.000.000,00	DIINAS PARIWISATA	
	3.26.03.2.01.0006	Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Kegiatan	2 Kegiatan	339.930.000,00	339.830.000,00	303.990.000,00	-35.940.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan		344.468.000,00	DIINAS PARIWISATA	
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Promosi	1 Promosi	139.081.000,00	314.982.872,00	184.035.944,00	44.954.944,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	-		155.532.000,00	DIINAS PARIWISATA	
4.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase ekonomi kreatif yang dikembangkan				34,61 %	34,61 %	126.036.000,00	126.036.000,00	41.836.000,00	5.864.000,00						131.900.000,00		
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Komunitas Ekonomi Kreatif yang mempunyai insentif				83 %	83 %	126.036.000,00	126.036.000,00	41.836.000,00	-84.200.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	131.900.000,00	DIINAS PARIWISATA	
	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	126.036.000,00	126.036.000,00	41.836.000,00	-84.200.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan		131.900.000,00	DIINAS PARIWISATA	
5.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif				32 %	32 %	45.200.000,00	24.700.000,00	24.700.000,00	25.800.000,00						71.000.000,00		
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				11 %	11 %	45.200.000,00	24.700.000,00	24.700.000,00	-20.500.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang	71.000.000,00	DIINAS PARIWISATA	
	3.26.05.2.01.0006	Facilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				30 Orang	30 Orang	21.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	-10.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan		30.000.000,00	DIINAS PARIWISATA	
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang menerima Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				35 Orang	35 Orang	24.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	-10.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan		41.000.000,00	DIINAS PARIWISATA	
			J U M L A H						6.519.992.870,00	6.920.142.277,00	5.672.691.887,10	197.411.203.431,82						6.274.747.365,00		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai pada Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 adalah Meningkatkan potensi pariwisata dengan indikator Persentase PAD sektor pariwisata terhadap pendapatan dengan target 19% pada tahun 2025.

2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tujuan Dinas Pariwisata dalam kurun waktu tahun 2024-2026 adalah Meningkatnya daya tarik daerah tujuan wisata dengan indikator sebagai berikut :

1. Jumlah kunjungan wisatawan dengan target 455.493 orang
2. Rata-rata lama tinggal wisatawan dengan target 1,06 hari
3. Tingkat hunian akomodasi dengan target 40%
4. Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki izin dengan target 74,57%

3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2025

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan yang dilaksanakan :

1.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

1.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

1.2.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.2.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.2.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.2.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

1.3.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.3.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.3.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

1.4.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.4.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan yang dilaksanakan :

2.1. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

- 2.1.1. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

3. Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan yang dilaksanakan :

- 3.1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,
Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

- 3.1.1. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar
Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
- 3.1.2. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media
Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Kegiatan yang dilaksanakan :

- 4.1. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

- 4.1.1. Pengembangan Sistem Pemasaran

5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan yang dilaksanakan :

- 5.1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

- 5.1.1. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Ekonomi Kreatif
- 5.1.2. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk
Pengembangan Pariwisata

BAB IV

PENUTUP

Demikian Perencanaan Kinerja (Renja) Perubahan Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 yang penuh keterbatasan dalam penyusunan, semoga perencanaan kinerja dapat memberikan arah dan strategi yang sangat jelas bagi pembangunan pariwisata di Kota Pangkal Pinang serta dapat meningkatkan kualitas kinerja sumber daya manusia di Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang.

Semoga dalam pelaksanaannya, Perencanaan Kinerja Perubahan Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 ini lebih berkualitas dan bermanfaat bagi kepentingan publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik serta mengarah kepada upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang dan tentu saja muara akhirnya pada pencapaian Visi dan Misi Kota Pangkal Pinang.

Perencanaan Kinerja Perubahan ini jauh dari kesempurnaan dan memerlukan banyak perbaikan untuk itu masukan dan saran terhadap perbaikan sangat diharapkan dan atas perhatian serta keseriusan membaca panduan ini diucapkan terima kasih.